

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI IMPLEMENTASI
PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DI KECAMATAN SEMARANG
UTARA**

Lastiur Maida Sihombing, Retna Hanani

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) program is one of the strategic efforts of the Directorate General of Human Settlements in accelerating the handling of slum areas through the 100-0-100 movement, namely 100% access to clean water, 0% slums and 100% proper sanitation in 2019. North Semarang District is one of the priority areas for slum upgrading in Semarang City. However, previous research on the KOTAKU program shows that KOTAKU targets have not been achieved. This study aims to analyze the factors that influence the implementation of the KOTAKU program in North Semarang District. The theory used is the implementation theory of George C. Edward III. There are five factors analyzed, namely communication, resources, disposition, bureaucratic structure and community support. The research approach is descriptive quantitative with 83 respondents of KOTAKU program implementers in North Semarang District. Data analysis using SmartPLS software version 4.0. The results showed that communication had a negative effect on implementation, amounting to 0.089. Resources have a positive and significant effect on implementation, amounting to 0.498. Disposition has a positive effect on implementation, amounting to 0.104. Bureaucratic structure has a negative effect on implementation, amounting to 0.067. Community support has a positive and significant effect on implementation, amounting to 0.108. Simultaneously, communication, resources, disposition, bureaucratic structure, and community support affect implementation by 0.702 or 70.2%, the rest (100%-70.2% = 29.8%) is influenced by other factors outside the study. The suggestions given by the researcher are to ensure consistency and uniformity of information, add funding allocations to address incomplete slum problems, increase public trust to obtain optimal support from the community, and improve coordination and good cooperation between government agencies, BKM/KSM, and the community.

Keywords: Communication; Resources; Disposition; Bureaucratic structure; Community support

ABSTRAK

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan salah satu upaya strategis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh melalui gerakan 100-0-100, yaitu 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak di tahun 2019. Kecamatan Semarang Utara menjadi salah satu daerah prioritas penanganan kawasan kumuh di Kota Semarang. Namun, penelitian terdahulu tentang program KOTAKU menunjukkan target KOTAKU belum tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara. Teori yang digunakan adalah teori implementasi dari George C. Edward III. Ada lima faktor yang di analisis yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan dukungan masyarakat. Pendekatan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan responden 83 orang pelaksana program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara. Analisis data menggunakan *software* SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh negatif terhadap implementasi, sebesar 0.089. Sumber daya berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi, sebesar 0.498. Disposisi berpengaruh positif terhadap implementasi, sebesar 0.104. Struktur birokrasi berpengaruh negatif terhadap implementasi, sebesar 0.067. Dukungan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi, sebesar 0.108. Secara simultan, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan dukungan masyarakat berpengaruh terhadap implementasi sebesar 0,702 atau 70,2%, sisanya (100%-72,5% =29,8%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Saran yang diberikan peneliti adalah memastikan konsistensi dan keseragaman informasi, menambahkan alokasi dana untuk mengatasi permasalahan kumuh yang belum tuntas, meningkatkan kepercayaan publik untuk memperoleh dukungan yang optimal dari masyarakat, serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik antara instansi pemerintah, BKM/KSM, dan masyarakat.

Kata Kunci: Komunikasi; Sumber daya; Disposisi; Struktur birokrasi; Dukungan masyarakat

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami pertumbuhan urbanisasi yang pesat, dengan proyeksi Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan 56,7% penduduk tinggal di wilayah perkotaan dan diperkirakan meningkat menjadi 66,6% pada tahun 2035. Bank Dunia memperkirakan pada tahun 2045, sekitar 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan, dengan pertumbuhan urbanisasi sebesar tiga persen setiap tahunnya (Safitri & Pradipta, 2023). Kota Semarang menjadi salah satu tujuan urbanisasi karena posisinya yang strategis sebagai pusat lalu lintas antar daerah di Pulau Jawa dan statusnya sebagai Ibu Kota Jawa Tengah (Ahyar, 2020).

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kota Semarang mengakibatkan munculnya permukiman kumuh yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi yang rendah, bencana rob dan banjir, peningkatan jumlah warga di titik tertentu, permasalahan drainase, dan tata kota (Ahyar, 2020). Kondisi ini diperparah dengan banyaknya rumah yang tidak memiliki sanitasi memadai dan kurangnya kedisiplinan dalam hal kebersihan (Kompas.Com, 2019). Sari & Ridlo (2022) menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan permukiman kumuh di perkotaan.

Untuk mengatasi masalah permukiman kumuh, pemerintah menginisiasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan di 217 Kabupaten/Kota (Website Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman). Di Kota Semarang, program ini awalnya berpedoman pada SK Walikota Semarang No. 050/801/2014 yang mencatat 415,83 Ha kawasan kumuh tersebar di 15 Kecamatan (Sitorus dalam Sahara et al., 2023). Meskipun target pengentasan kawasan kumuh seharusnya selesai pada tahun 2019, data terbaru menunjukkan masih terdapat 178,11 hektar kawasan permukiman kumuh di Kota Semarang pada tahun 2024 (Kompas.com, 2024).

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, belum semua daerah di Kota Semarang yang bebas dari kawasan kumuh (0%), hanya Kecamatan Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Candisari, Genuk, dan Ngaliyan yang sudah tidak memiliki kawasan kumuh (RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026). Artinya, beberapa kecamatan lainnya belum mencapai target 0% kawasan kumuh salah satunya Kecamatan Semarang Utara.

Pada tahun 2020-2022, pelaksanaan KOTAKU kembali dilakukan di Kota Semarang dengan adanya pembentukan Pokja KOTAKU (Joanne Endamia Ameita Purba, 2021). Tahun 2021, Walikota Semarang memperbaharui kembali SK

Kumuh dengan mengeluarkan SK Walikota Semarang Nomor 050/275/2021 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Semarang sebagai acuan dalam pelaksanaan Program KOTAKU. Dari SK tersebut, Kecamatan Semarang Utara menjadi salah satu daerah prioritas yang perlu penanganan kawasan permukiman kumuh. Jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya, Kecamatan Semarang Utara memiliki kawasan kumuh terluas dan masuk kategori kumuh berat (Perkim, id, 2020). Pada tahun 2018, dari 120,91 ha kawasan kumuh di Kota Semarang, 111,91 ha berada di Kecamatan Semarang Utara, yang merupakan 92,56% dari semua permukiman kumuh di Kota Semarang (Seruntingrum, 2022).

Pemugaran kawasan permukiman kumuh dilaksanakan di lima delineasi kumuh di Semarang Utara yaitu Kuningan, Dadapsari, Bandarharjo, Panggung Kidul dan Tanjung Mas (Rosellasari & Subowo, 2019). Berikut disajikan data luasan permukiman kumuh di Semarang Utara:

Tabel 1. 1 Luas Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Semarang Utara

Kelurahan	Luas (ha)
Bandarharjo	33,44
Kuningan	23,09
Dadapsari	27,24
Panggung Kidul	26,00
Tanjung Mas	37,24

Sumber: RPJMD Kota Semarang 2021-2026

Kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang tersebar di 10 titik yaitu, Tanjung mas memiliki dua titik berada di kawasan Kebonharjo dan Tambak Lorok. Kelurahan Bandarharho memiliki kawasan permukiman kumuh sebanyak dua titik yang terbagi linier mengikuti alur jalan dan berpola terpusat dan mengelompok. Kemudian, Kelurahan Kuningan terdiri dari dua titik kawasan. Kelurahan Dadapsari terdiri dari satu titik. Kemudian Kelurahan Panggung Kidul satu titik (Aspin & Nafsi, 2021).

Semenjak dilanjutnya program KOTAKU di tahun 2020, persebaran kawasan kumuh di Kota Semarang dan juga di Semarang Utara mengalami penurunan, tetapi belum sepenuhnya tuntas tertangani, dibuktikan dengan data terbaru persebaran kawasan kumuh yang ditetapkan dengan adanya SK Walikota No. 050/275 Tahun 2021 Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Semarang, kawasan permukiman kumuh Kota Semarang ditetapkan sebesar 431,54 Ha yang tersebar di 45 kelurahan. Pada penelitian ini, ada lima kelurahan di Kecamatan Semarang Utara yang akan dianalisis yaitu kelurahan deliniasi kawasan kumuh yang terdiri dari Kelurahan Bandarharjo, Tanjung Mas, Kuningan, Dadapsari, dan Panggung Kidul. Berikut

data sesuai SK terbaru di lima kelurahan tersebut:

Tabel 1. 2 Luas Kawasan Permukiman Kumuh Lima Kelurahan Deliniasi

Lokasi	Luas (Ha)
Bandarharjo	4,26
Dadapsari	25,32
Kuningan	14,10
Panggung Kidul	5,47
Tanjung Mas	17,34

Sumber: Surat Keputusan Walikota Nomor 050/275 Kota Semarang Tahun 2021

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel bisa dilihat bahwa luasan kawasan kumuh di Kecamatan Utara mengalami penurunan dari SK tahun 2014. Namun, belum tuntas secara keseluruhan sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 0% kawasan kumuh.

Kawasan kumuh di Kecamatan Semarang Utara tersebar di beberapa kelurahan seperti Tanjung Mas, Bandarharjo, dan Kuningan. Di Tanjung Mas, kawasan kumuh berbentuk memusat dan mengelompok di sekitar pasar dengan berbagai industri, pelabuhan, dan stasiun kereta api. Kawasan ini terbentuk akibat pembangunan bangunan warga di lahan kosong Kebonharjo dan Tambaklorok, baik secara legal maupun ilegal (Aspin & Nafsi, 2021). Sementara itu, di Bandarharjo, kawasan kumuh tersebar di dua lokasi dengan pola permukiman terpusat yang mengelompok di sekitar pasar dan industri. Kawasan ini juga menghadapi masalah

sanitasi yang serius, dengan tingginya kasus diare akibat penggunaan air minum dari sumur artesis (Satwika et al., 2021).

Berbagai tantangan masih dihadapi oleh kelurahan-kelurahan di Semarang Utara. Dadapsari masih mengalami banjir karena tingkat kelerengan yang rendah, dengan 241 KK belum terlayani akses air bersih yang layak (Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Tahun 2022-2026). Di Tanjung Mas, terdapat 17,34 ha kawasan kumuh yang dipengaruhi oleh faktor area yang berada di dataran rendah dan dekat dengan pesisir, mengakibatkan penurunan tanah dan genangan air rob (RPJMD Kota Semarang 2021-2026). Pada tahun 2024, sebanyak 400 rumah di Kelurahan Tanjung Mas mengajukan bantuan RTLH ke pemerintah pusat dan swasta (Iman 2024). Di Kuningan, masih terdapat 130 KK yang tidak terlayani air bersih dan 14,10 ha luasan kumuh (Perwal Semarang No. 19 Tahun 2023).

Implementasi program KOTAKU di Semarang Utara belum sepenuhnya berhasil menuntaskan masalah kawasan permukiman kumuh. Penelitian Sahara et al., (2023) menemukan bahwa pelaksanaan program KOTAKU masih belum optimal karena berbagai kendala, termasuk pengerjaan yang tidak sesuai jadwal dan

kesulitan BKM dalam mengontrol pemanfaatan pembangunan. Masalah lain yang ditemukan meliputi pengelolaan informasi yang kurang baik, legitimasi pemilihan anggota BKM yang belum tepat, kurangnya partisipasi BKM/LKM, serta kolaborasi yang belum optimal antara BKM/KSM dengan masyarakat dan organisasi non-pemerintah (Perwal Semarang No. 19 Tahun 2023).

Berangkat dari berbagai permasalahan di atas, penulis hendak melakukan penelitian untuk menganalisis lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program KOTAKU sehingga masih belum bisa mencapai target 0% kumuh dan belum tuntasnya masalah permukiman kumuh di Semarang Utara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah komunikasi secara parsial terhadap implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara?
2. Apakah sumber daya berpengaruh secara parsial terhadap implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara?
3. Apakah disposisi secara parsial berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara?
4. Apakah struktur birokrasi secara parsial berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara?
5. Apakah dukungan masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara?
6. Apakah komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan dukungan masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara?

Dengan hipotesis sebagai berikut:

H1: Komunikasi secara parsial berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara

H2: Sumber daya secara parsial berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara

H3: Disposisi secara parsial berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara

H4: Struktur birokrasi secara parsial berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara

H5: Dukungan masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap implementasi

program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara.

H6: Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan dukungan masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode explanatory research dengan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Populasi penelitian melibatkan 83 orang implementor program KOTAKU di lima kelurahan di Kecamatan Semarang Utara, dengan menggunakan teknik sampling jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, dengan menggunakan skala Likert sebagai alat ukur. Analisis data menggunakan metode Structural Equation Modelling - Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan SmartPLS versi 4, yang terdiri dari analisis outer model untuk menguji validitas dan reliabilitas, serta inner model. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai t-statistic dan p-values pada Path coefficient, menggunakan teknik bootstrapping dengan tingkat signifikansi 5% dimana nilai t-statistik yang valid harus

melebihi 1.96 dan p-value harus kurang dari 0.05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan dukungan masyarakat. Baik secara parsial dan juga simultan (bersama). Serangkaian pengujian statistik yang dilakukan mulai dengan analisis nilai F-square/*Effect size* (mengukur besar pengaruh parsial), kemudian analisis nilai R-Square (mengukur besar pengaruh simultan/bersama) serta dilanjutkan dengan uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan SmartPLS 4.0 dengan menganalisis nilai t-statistic dan p-values pada Path coefficient, menggunakan teknik bootstrapping dengan 5000 subsamples dan pendekatan two tailed karena arah hipotesis belum diketahui. Dengan tingkat signifikansi 5% atau 0.05, penelitian ini menggunakan nilai t-statistik 1.96 sebagai ambang batas validitas, dimana suatu indikator dianggap valid jika nilai t-statistik melebihi 1.96. Kriteria signifikansi ditentukan melalui p-value, dengan nilai kurang dari 0.05 menunjukkan signifikansi dan nilai lebih dari 0.05 menandakan ketidaksignifikanan dalam pengujian yang dilakukan.



Gambar 3.1 PLS-SEM Model

Sumber: Data Primer diolah dengan SmartPLS, 2024

Berikut hasil uji Effect Size (*F-Square*):

F-square adalah uji untuk menilai seberapa besar pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat. Menurut Hair et al. (2017), penilaian *f-square* dibagi tiga yaitu: bernilai yakni $<0,02$ berarti pengaruh rendah, $0,02-0,15$ berarti pengaruh moderat/ sedang, $0,151-0,35$ diartikan pengaruh tinggi. Berikut adalah nilai *f-square* variabel penelitian ini:

Tabel 3. 1 Nilai F-Square

	Implementasi
Komunikasi	0.089
Sumber Daya	0.498
Disposisi	0.104
Struktur Birokrasi	0.067
Dukungan Masyarakat	0.108

Sumber: Data Primer diolah Penulis, 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh variabel komunikasi terhadap implementasi bernilai *f-square* sebesar 0,089 yang berarti berpengaruh sedang (moderat).

2. Pengaruh variabel sumber daya terhadap implementasi bernilai *f-square* sebesar 0.498 yang berarti berpengaruh besar/kuat.
3. Pengaruh variabel disposisi terhadap implementasi bernilai *f-square* sebesar 0.104 yang berarti berpengaruh sedang (moderat).
4. Pengaruh variabel struktur birokrasi terhadap implementasi bernilai *f-square* sebanyak 0.067 yang berarti berpengaruh sedang (moderat).
5. Pengaruh variabel dukungan masyarakat terhadap implementasi bernilai *f-square* sebanyak 0.108 yang berarti berpengaruh sedang (moderat).

Berikutnya, hasil uji Koefisien Determinasi (R^2 /*R-Square*):

Tabel 3. 2 Nilai R-Square

	R-square	R-square adjusted
Implementasi	0.702	0.682

Sumber: Data Primer diolah Penulis, 2024

Nilai R-Square pada variabel implementasi sebesar 0,702. Artinya, variabel X yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan dukungan masyarakat secara simultan/bersama-sama berpengaruh terhadap Y (implementasi) sebesar 0,702 atau sebesar 70,2%. Karena nilai *R-square* kurang dari 0,75 dan lebih dari 0,50 maka dapat dikategorikan ke

dalam kategori "sedang/moderat" (Hair et al., 2017). Dari angka tersebut dapat diartikan bahwa variabel implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan dukungan masyarakat sebesar 72,5% dan sisanya ($100\% - 72,5\% = 29,8\%$) dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Berikutnya, penjabaran hasil uji hipotesis akan disajikan lebih jelas dalam tabel berikut:

Tabel 3. 3 Uji Hipotesis (metode bootstrapping)

	<i>Path Coefficient</i>	T- <i>statistic</i>	P- <i>values</i>	Kesimpulan
Komunikasi → Implementasi	-0.279	2.012	0.044*	H1 Diterima
Sumber Daya → Implementasi	0.672	4.272	0.000*	H2 Diterima
Disposisi → Implementasi	0.364	2.557	0.011*	H3 Diterima
Struktur Birokrasi → Implementasi	-0.252	2.190	0.029*	H4 Diterima
Dukungan Masyarakat → Implementasi	0.314	2.734	0.006*	H5 Diterima

Sumber: Data Primer diolah dengan *SamrtPLS*, 2024

Keterangan:

* : P-Value < 0.05

** : P-Value > 0.05

: Pengaruh Paling Signifikan

Pengaruh Komunikasi Terhadap Implementasi Program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara

Komunikasi dalam proses implementasi kebijakan sangat penting karena lewat proses komunikasi, informasi

bisa disampaikan kepada pelaksana agar mereka mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk menjalankan dan melaksanakan kebijakan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai (Edward III dalam Widodo, 2010). Pada analisis ini, komunikasi menggambarkan proses penyampaian informasi dan penerimaan informasi yang terjadi selama pelaksanaan program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara.

Secara keseluruhan, komunikasi dalam implementasi program KOTAKU di Semarang Utara dinilai baik oleh 83 responden, dengan nilai mean 3,36. Informasi disampaikan tepat waktu melalui WA group, selebaran kertas, dan dokumen SOP, serta sosialisasi dan pelatihan. Namun, beberapa responden memberikan nilai rendah pada item KM6 dan KM7 karena informasi yang diterima terkadang berbeda antara pelaksana, memerlukan konfirmasi ulang. Oleh karena itu, meskipun komunikasi sudah baik, perbaikan tetap diperlukan pada item-item tertentu agar informasi konsisten dan seragam di antara pelaksana.

Berdasarkan hasil uji hipotesis di tabel 3.24, dapat diketahui bahwa nilai *Path coefficient* komunikasi (X1) terhadap implementasi (Y) memiliki arah hubungan negatif dengan nilai -0.279. Arti dari arah hubungan ini adalah ketika komunikasi memperoleh nilai yang tinggi,

implementasi justru memperoleh penilaian yang rendah. Pada kasus implementasi program KOTAKU di Semarang Utara, variabel komunikasi ditemukan tidak memberikan efek secara positif terhadap implementasi program KOTAKU melainkan memberikan arah pengaruh yang negatif. Kemudian, berdasarkan nilai skor *t-statistic* memiliki nilai $2.012 >$ skor *t* tabel yaitu 1,96 dan *p-values* dengan skor $0.044 <$ angka signifikan yaitu 0,05. Maka pada penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara komunikasi terhadap implementasi meskipun efek yang diberikan bukan searah dengan besar pengaruh yaitu 0,089 (kategori sedang). Namun, sesuai dengan hipotesis dan kriteria yang digunakan dalam menguji hipotesis, komunikasi memiliki pengaruh terhadap implementasi program KOTAKU dan **H1 diterima**.

Penemuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak memberikan pengaruh secara positif terhadap peningkatan implementasi program KOTAKU, melainkan ketika komunikasi beroleh penilaian yang baik dari responden, nilai pada implementasi justru lebih rendah. Sederhananya, dapat diartikan juga bahwa komunikasi sudah baik tetapi implementasi masih belum optimal. Kemudian setelah dilakukan analisis, nilai *mean* variabel komunikasi adalah senilai 3,36 sementara nilai *mean*

dari variabel implementasi 3,13. Yang artinya, komunikasi dalam implementasi program KOTAKU sudah dinilai baik oleh responden, tetapi untuk implementasi, nilai *mean*-nya justru lebih rendah yaitu hanya 3,13. Hal ini, dibuktikan dengan adanya item pada variabel implementasi yang mendapat nilai yang rendah dari responden yaitu item IP3, IP4 dan IP7 dengan *mean* tiap item yaitu hanya mendapat 2,89, 2,93 dan 3,05.

Hasil temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Rubianti et al., (2020). Penelitian yang dilakukan mereka adalah menganalisis implementasi program KOTAKU di Desa Sokaraja Kidul. Temuannya yaitu ditemukan bahwa implementasi program KOTAKU di desa tersebut belum sepenuhnya berhasil meskipun dari segi faktor komunikasi sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena pada implementasi program KOTAKU ditemukan masalah seperti peran aktor yang belum optimal, prosedur pelaksanaan yang rumit dan juga sumber dana yang masih belum bisa mengatasi semua permasalahan kumuh di Desa Sokaraja Kidul.

Pengaruh Sumber Daya terhadap Implementasi Program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara

Sumber daya merujuk pada berbagai hal yang diperlukan untuk menjalankan

suatu kegiatan/program meliputi sumber daya manusia, anggaran, peralatan/fasilitas dan kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010), sumber daya menjadi salah faktor yang penting dalam implementasi.

Hasil rekapitulasi dan kategorisasi jawaban dari 83 responden menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya dalam implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara dinilai cukup baik dengan nilai mean 3,30. Namun, beberapa responden memberikan nilai rendah pada item SD1 dan SD4. Pada item SD1, 6 responden merasa ketersediaan staf belum mencukupi karena pernah kekurangan staf dalam beberapa kegiatan. Sedangkan pada item SD4, 3 responden menilai dana belum cukup karena masih banyak permukiman kumuh yang belum ditangani dan rumah tidak layak huni yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan tabel uji hipotesis, dapat diketahui bahwa nilai *Path coefficient* sumber daya (X2) terhadap implementasi (Y) memiliki arah hubungan positif dengan nilai 0.672. Skor *t-statistics* memiliki nilai $4.272 >$ skor *t-tabel* yaitu 1,96 dan *p-values* dengan skor $0.000 <$ angka signifikan yaitu 0,05. Besaran pengaruh parsial sumber daya terhadap implementasi yaitu sebesar 0,498 (kategori kuat). Maka pada penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh

sumber daya dan **signifikan** terhadap implementasi dan **H2 diterima**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan penelitian terdahulu yaitu yang dilakukan oleh Arifman Zebua, dkk (2023). Menyebutkan bahwa sumber daya secara parsial memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Mentawai (Zebua & Roni Ekha Putera, 2023). Penelitian ini menunjukkan keselarasan dengan temuan penelitian terdahulu yang menggunakan teori Edward III dalam menganalisis pengaruh faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sonny Warouw tentang implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kota Medan tahun 2020, yang memperoleh nilai $p\text{-value} = 0,0001$ untuk pengaruh sumber daya terhadap implementasi kebijakan (Fransiari et al., 2021). Kedua penelitian sama-sama membuktikan bahwa sumber daya menjadi variabel yang berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan, dalam konteks penelitian ini khususnya pada implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara.

Pengaruh Disposisi Terhadap Implementasi Program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara

Disposisi dalam implementasi kebijakan merujuk pada sikap para pelaksana yang terdiri dari kemauan, keinginan dan kecenderungan secara sungguh-sungguh dalam mengimplementasikan program KOTAKU. Edward III dalam Widodo (2010) menyebutkan bahwa disposisi menjadi salah faktor yang berperan penting dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan rekapitulasi dan kategorisasi jawaban dari kuesioner yang disebarkan kepada 83 responden, secara keseluruhan responden menilai bahwa variabel disposisi pada implementasi program KOTAKU di Semarang Utara cukup baik, dengan nilai mean tertinggi sebesar 3,38. Mayoritas responden mencatat tingginya keinginan pelaksana untuk berpartisipasi dan komitmen untuk mencapai tujuan program didukung dengan adanya slogan-slogan motivasi seperti "Ayo bangun Bandarharjo" dan semangat untuk mengatasi masalah kumuh. amun, beberapa responden memberikan nilai rendah pada item DP5 (nilai mean 3,36) karena ketidakbersediaan masyarakat memberikan area depan rumah untuk aktivitas pembangunan fisik.

Berdasarkan tabel uji hipotesis, dapat diketahui bahwa nilai *Path coefficient* disposisi (X3) terhadap implementasi (Y) memiliki arah hubungan positif dengan nilai 0.364. Skor t-statistics memiliki nilai

2.557 > skor t-tabel yaitu 1,96 dan p-values dengan skor $0.011 <$ angka signifikan yaitu 0,05. Besaran pengaruh parsial dari disposisi terhadap implementasi KOTAKU yaitu sebesar 0,104 (kategori sedang). Maka pada penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh disposisi terhadap implementasi dan **H3 diterima**.

Hasil penelitian yang menemukan adanya pengaruh disposisi terhadap implementasi sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. Fransiari et al. (2021) dalam penelitiannya tentang implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Masyarakat Kota Medan menemukan bahwa disposisi memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi dengan nilai p-value 0,0001. Demikian pula dengan penelitian Juhairiyah et al. (2023) yang meneliti implementasi penelusuran kontak erat covid-19 di Kabupaten Banjar, juga menemukan bahwa disposisi memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan. Meskipun ketiga penelitian memiliki objek kajian yang berbeda, ketiganya menggunakan teori Edward III dan menghasilkan temuan yang sama yaitu disposisi berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan, termasuk dalam konteks program KOTAKU di Semarang Utara yang menjadi fokus penelitian ini.

Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara

Struktur birokrasi adalah salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, persiapan yang tepat dan benar sangat diperlukan (Edward III dalam (Nugroho, 2009). Dalam implementasi kebijakan, terdapat dua elemen penting dalam struktur birokrasi: pertama, adanya standar operasional prosedur (SOP) yang dibuat untuk menjelaskan pedoman tindakan dan aturan dalam pelaksanaan program. Kedua, fragmentasi atau pelimpahan tanggung jawab kegiatan kepada para anggota BKM dan pelaksana program KOTAKU.

Hasil rekapitulasi dan kategorisasi jawaban yang didapat dari kuesioner yang sudah disebarakan kepada 83 responden, secara keseluruhan responden menilai bahwa variabel struktur birokrasi dalam implementasi KOTAKU di Semarang Utara sudah cukup baik, dibuktikan dengan perolehan nilai *mean* variabel sebesar 3,33. Sebagian besar responden memberikan berbagai alasan atas penilaian yang diberikan pada variabel struktur birokrasi. Responden menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program KOTAKU sudah tersedia SOP (Standar Operasional Prosedur) yang lengkap, jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana program KOTAKU. Keberadaan SOP ini menurut pelaksana penting sebagai dasar dan panduan yang digunakan agar pelaksanaan program KOTAKU berjalan dengan aturan

dan standar yang ada. Selain itu, implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara juga sudah sesuai dengan SOP yang disediakan. Setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan berlandaskan dengan SOP yang ada agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dari pelaksana program KOTAKU. Selama pelaksanaan ada juga monitoring langsung dari fasilitator kelurahan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku (Wawancara dengan Ketua BKM Bandarharjo). Selanjutnya, berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dinilai sudah baik oleh para responden, karena tugas dan tanggung jawab sudah diberitahukan dengan jelas dan diberi penjelasan di awal sebelum kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan penjabaran tersebut, bisa disimpulkan bahwa struktur birokrasi meliputi ketersediaan SOP, dan fragmentasi (pembagian tugas dan tanggung jawab) kepada pelaksana program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan tabel hipotesis, dapat diketahui bahwa nilai *Path coefficient* struktur birokrasi (X4) terhadap implementasi (Y) memiliki arah hubungan negatif dengan nilai -0.252. Skor *t-statistics* memiliki nilai 2.190 > skor *t-tabel* yaitu 1,96 dan *p-values* dengan skor 0.029 <

angka signifikan yaitu 0,05. Besarnya pengaruh parsial struktur birokrasi terhadap implementasi KOTAKU yaitu sebesar 0,067 (kategori sedang). Maka pada penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh struktur birokrasi terhadap implementasi dan **H4 diterima**.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi (X4) memiliki hubungan negatif terhadap implementasi (Y) dengan nilai path coefficient sebesar -0.252. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun struktur birokrasi memperoleh penilaian baik dari responden dengan nilai mean 3,33, implementasi program KOTAKU justru mendapat nilai mean yang lebih rendah yaitu 3,13. Hal ini terutama tercermin pada rendahnya nilai beberapa item implementasi seperti IP3, IP4, dan IP7 yang hanya mencapai mean 2,89, 2,93, dan 3,05. Berdasarkan keterangan Ketua BKM Tanjung Mas, beberapa faktor penyebabnya adalah pandemi COVID-19 yang menghambat pelaksanaan program dan mengakibatkan mundurnya target waktu yang diharapkan dan keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Andreal Taqwa and Dadang Mashur (2024) yang menemukan bahwa meskipun struktur birokrasi berjalan baik dalam implementasi program KOTAKU di Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, implementasi program tetap tidak

berjalan optimal karena adanya faktor eksternal. Demikian pula dalam konteks Kecamatan Semarang Utara, meski struktur birokrasi mendapat penilaian baik dari responden, implementasi program KOTAKU belum maksimal dalam mengatasi masalah permukiman kumuh di wilayah tersebut.

Pengaruh Dukungan Masyarakat terhadap Implementasi Program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara

Dukungan masyarakat sebagai variabel (X5) dalam penelitian ini merujuk pada bentuk keterlibatan masyarakat lewat dukungan fisik dan non-fisik dalam proses pelaksanaan program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara. Dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi implementasi sesuai dengan teori dari Jan Merse yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi implementasi yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat (fisik dan non-fisik) dan pembagian potensi. Faktor dukungan masyarakat yang dimaksud dalam model implementasi dari Jan Merse merujuk pada dukungan masyarakat lewat partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program. Adapun pertimbangan yang penulis lakukan dalam menambahkan faktor dukungan masyarakat dalam analisis faktor yang memengaruhi implementasi program

KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara adalah berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi dari masyarakat menjadi salah satu faktor yang banyak menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan program KOTAKU di beberapa daerah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ramandei & Nawipa, (2023) yang menemukan pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Hamadi belum maksimal dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat.

Hasil rekapitulasi dan kategorisasi jawaban yang diperoleh dari kuesioner yang sudah disebarakan kepada 83 responden, menunjukkan bahwa responden menilai dukungan masyarakat dalam implementasi program KOTAKU sudah cukup baik dengan nilai mean 3,32. Responden menilai adanya peningkatan jumlah masyarakat yang bergabung dalam komunitas seperti BKM dan KSM, serta antusiasme masyarakat dalam kegiatan fisik yang juga memberikan tambahan pendapatan. Namun, masih ada masyarakat yang kurang percaya dan tidak sepenuhnya mendukung pelaksanaan program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara. Pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan juga terkadang masyarakat yang hadir tidak banyak, sementara sosialisasi juga diperuntukkan untuk masyarakat sekitar bukan hanya pada pelaksana agar

memahami cara memelihara infrastruktur yang dibangun dalam program KOTAKU.

Berdasarkan tabel hipotesis, dapat diketahui bahwa berdasarkan nilai *Path coefficient*, dukungan masyarakat (X5) terhadap implementasi (Y) memiliki arah hubungan positif dengan nilai 0.314. Artinya, semakin tinggi dukungan masyarakat semakin baik juga implementasi program KOTAKU. Kemudian dari hasil uji juga diperoleh nilai skor *t-statistics* memiliki nilai $2.734 >$ skor *t-tabel* yaitu $>1,96$ dan *p-values* dengan skor $0.006 <$ angka signifikan yaitu 0,05. Besaran pengaruh parsial dari dukungan masyarakat terhadap implementasi program KOTAKU yaitu sebesar 0,108 (kategori sedang). Maka pada penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh dukungan masyarakat dan **signifikan** terhadap implementasi, dan **H5 diterima**.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yaitu yang dilakukan menunjukkan penemuan yang sama. Penelitian (Delyus & Dian Kurnia Anggreta, 2023) salah satunya yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU di Pasar Pandan Air Mati, Kota Solok. Temuannya menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sangat dibutuhkan mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, dan keterlibatan dalam pelaksanaan dan kegiatan fisik dari

program KOTAKU. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi/rapat serta menyumbang gagasan atau ide. Hasil penelitian ini, mendukung argumen dan temuan penulis terkait dukungan masyarakat memiliki pengaruh terhadap implementasi program KOTAKU. Sehingga, harapannya dukungan masyarakat lebih maksimal lagi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program KOTAKU dan program-program dari pemerintah dalam mengatasi masalah permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara.

Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi dan Dukungan Masyarakat Terhadap Implementasi Program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara

Pada penelitian ini, selain analisis secara parsial dari lima variabel, dilakukan juga uji dan analisis dari kelima variabel X yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan dukungan masyarakat terhadap variabel Y yaitu implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara. Kerangka analisis yang digunakan mengintegrasikan model implementasi Edward III dan menambahkan faktor partisipasi masyarakat dari teori Jan Merse. Kelima variabel tersebut secara teori disebutkan sebagai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi. Sehingga pada penelitian ini,

dilakukan analisis dan uji pengaruh dari lima variabel X terhadap Y secara simultan/bersama-sama

Untuk melihat pengaruh secara simultan dari variabel $X_1+X_2+X_3+X_4+X_5$ terhadap Y, dapat diketahui dari nilai R-square. Dalam hal ini, nilai R-square akan dianalisis dengan menggunakan bantuan aplikasi SmartPLS. Hasil yang diperoleh yaitu bahwa nilai R-Square variabel implementasi sebesar 0,702. Artinya, variabel X (Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan dukungan masyarakat) secara simultan/bersama-sama berpengaruh terhadap Y (implementasi) sebesar 0,702 atau sebesar 70,2%. Karena nilai *R-square* kurang dari 0,75 dan lebih dari 0,50 maka dapat dikategorikan ke dalam kategori "sedang/moderat". Dari angka tersebut dapat diartikan bahwa variabel implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan dukungan masyarakat sebesar 72,5% dan sisanya ($100\% - 72,5\% = 29,8\%$) dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari peneliti sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh Rosyanti, Retnowati, and Habibullah (2022). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terkait "Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten

Tegal Tahun 2017–2019”. Temuannya memperoleh hasil bahwa sesuai dengan teori Edward III, faktor-faktor dari implementasi yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi memiliki pengaruh dalam mencapai keberhasilan implementasi program KOTAKU di Desa Harjosari. Namun, ada hambatan yang ditemukan yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU. Hal ini juga ditemukan oleh penelitian dari Vojana, Maulana, and Yulianti (2022) yang membahas tentang kolaborasi antar aktor dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kota Serang. Hasil penelitian menemukan adanya masalah yang mempengaruhi pelaksanaan program KOTAKU yaitu kesadaran dan partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan dukungan masyarakat terhadap implementasi program KOTAKU. Kelima variabel tersebut secara bersamaan mempengaruhi implementasi program, namun sumber daya dan dukungan masyarakat memiliki efek terbesar. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya dan dukungan masyarakat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program

KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara dalam mengentaskan permukiman kumuh dan mencapai target yang diharapkan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara belum berhasil mencapai target 100-0-100 yaitu 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak. Sesuai dengan hipotesis yang telah disusun, ditemukan hasil yaitu:

1. Komunikasi berpengaruh negatif terhadap implementasi, sebesar 0.089.
2. Sumber daya berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi, sebesar 0.498.
3. Disposisi berpengaruh positif terhadap implementasi, sebesar 0.104.
4. Struktur birokrasi berpengaruh negatif terhadap implementasi, sebesar 0.067.
5. Dukungan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi, sebesar 0.108.
6. Secara simultan, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan dukungan masyarakat berpengaruh terhadap implementasi sebesar 0,702 atau 70,2%, sisanya (100%-72,5%

=29,8%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Ditemukan beberapa masalah pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi:

1. Komunikasi: Nilai KM6 dan KM9 yang berada dibawah mean karena informasi yang tidak konsisten dan seragam diterima pelaksana
2. Sumber Daya: Ketersediaan staf, dan sumber daya dana yang belum mampu mengatasi seluruh masalah kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara.
3. Disposisi: Nilai item DP5 yang berada di bawah nilai mean karena ditemukan masalah ketidakpercayaan masyarakat dalam memberi lahan dalam kegiatan program KOTAKU.
4. Dukungan Masyarakat: Masih rendahnya partisipasi dan kehadiran dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan pemeliharaan infrastruktur dan pengolahan sampah dan limbah.
5. Implementasi program KOTAKU: Masih banyak kawasan kumuh yang tersisa di Semarang Utara, rumah tidak layak huni, drainase dan akses air yang belum merata dan layak digunakan.

SARAN

1. Komunikator (Bappeda, Disperkim, Fasilitator Kelurahan, dan Pemerintah Terkait) harus memastikan bahwa informasi yang diterima pelaksana program KOTAKU konsisten dan tidak

berubah dengan menetapkan standar komunikasi yang jelas dan terstruktur dengan memperhatikan penggunaan platform/media komunikasi yang terpusat dan terkontrol juga perlu diperhatikan untuk memastikan keseragaman informasi di antara pelaksana.

2. Peningkatan alokasi dana untuk penanganan kawasan permukiman kumuh. Responden menunjukkan bahwa masih banyak kawasan kumuh yang belum terselesaikan karena keterbatasan dana. Oleh karena itu, alokasi dana harus ditingkatkan untuk memastikan kelanjutan program dan penuntasan masalah permukiman kumuh.
3. Pemberian pemahaman yang baik kepada masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kebijakan atau program yang dijalankan.
4. Merancang kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang lebih menarik dan interaktif, seperti menggunakan metode kreatif seperti simulasi edukatif atau memberikan reward untuk memacu semangat dan ketertarikan masyarakat.
5. Mengembangkan program lanjutan untuk menyelesaikan masalah RTLH, drainase dan sanitasi yang belum terselesaikan. Program ini harus didukung dengan pendanaan yang

memadai dan pelaksanaan yang terencana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, I. (2020). *Pemukiman Kumuh di Tengah Perkembangan Kota Semarang*. Kompasiana. Di akses 30 Maret 2024.
- Andreal Taqwa, & Dadang Mashur. (2024). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(3), 23–34.
<https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i3.155>
- Aspin, A., & Nafsi, N. (2021). Pola Sebaran Permukiman Kumuh (Studi Kasus : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang). *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 8(1), 39.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Hasil Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 2015 - 2035*.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTI3NiMx/persentase-penduduk-daerah-perkotaan-hasil-proyeksi-penduduk-menurut-provinsi--2015---2035.html>
- Delyus, R. N., & Dian Kurnia Anggreta, S. R. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kotaku Menggunakan Gagasan G.C. Homans di Pasar Pandan Air Mati, Kota Solok. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 4(2), 87–102.
<https://doi.org/10.30596/jisp.v4i2.16040>
- Fransiyari, E., Warouw, S. P., & Brahmana, N. E. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Masyarakat Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 11(2), 201–211.
<https://doi.org/10.52643/jbik.v11i2.1250>
- Hair, J. F., Hult, G. T., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* - Joseph F. Hair, Jr., G. Tomas M. Hult, Christian Ringle, Marko Sarstedt. In *Sage*.
- Joanne Endamia Ameita Purba, A. M. (2021). ANALISIS PERAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DI KELURAHAN BANDARHARJO SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG. *E-Journal Undip*.
- Juhairiyah, J., Adhani, R., Arbain, T., Arifin, S., Lahdimawan, A., Laksono, A. D., & Andiarsa, D. (2023). Communication Factors, Dispositions, Resources, and Bureaucratic Structure Have an Effect on the Implementation of Close Contact Tracing of Covid-19 in Banjar Regency, With Policy As a Moderating Variable. *Asia Pacific Journal of Health Management*, 18(3), 1–10.
<https://doi.org/10.24083/apjhm.v18i3.2675>
- Kompas.com. (2024). *Kawasan Kumuh di Kota Semarang Masih 178,11 Hektare*.
<https://regional.kompas.com/read/2024/01/26/203527878/kawasan-kumuh-di-kota-semarang-masih-17811-hektare>
- Kompas.Com. (2019). *Ini Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh di Semarang*.
<https://regional.kompas.com/read/2019/09/13/18594811/hendi-ini-penyebab-munculnya-permukiman-kumuh-di-semarang>
- National Development Planning Agency (Bappenas). (2020). *Rpjmn 2020-2024*.

- <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan...dan.../rpjmn-2015-2019/>
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Politik Kebijakan*. Gramedia.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Tahun 2022-2026.
- Ramandei, L., & Nawipa, S. (2023). Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) terhadap Pencegahan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 1800–1816.
- Rosellasari, S. B., & Subowo, A. (2019). Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Mengenai Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Semarang Utara). *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(3), 262–276.
- Rosyanti, E., Retnowati, A., & Habibullah, A. (2022). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2017–2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 120–132.
- Rubianti, D. R., Wahyuningrat, & Simin. (2020). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 33–46.
- Safitri, I. K., & Pradipta, K. (2023). *Urbanisasi dalam Gambar, Tujuh puluh enam tahun setelah merdeka, urbanisasi Indonesia bertumbuh pesat*. Interaktif.Tempo.Co.
- Sahara, H., Ari Subowo, & Augustin Rina Herawati. (2023). *PERAN STAKEHOLDERS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN DADAPSARI KOTA SEMARANG*.
- Sari, A. R. S., & Ridlo, M. A. (2022). Studi Literature : Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 160. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20022>
- Satwika, S. W., Potro, S., & Sriyono. (2021). Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat dalam Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. *Edu Geography*, 9(3), 225–227.
- Seruntingrum. (2022, December 2). *Sebaran Pemukiman Kumuh Kec. Semarang Utara Sebelum dan Setelah KOTAKU*. Mapid.Co.Id.
- Sitorus, H., Astuti, R. S., & Purnaweni, H. (2020). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 74–94. \
- Vojana, V., Maulana, D., & Yulianti, R. (2022). Kolaborasi Aktor Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Kasemen Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(2), 314–323.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia.
- Zebua, A., & Roni Ekha Putera, K. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Administrasi Dan Kebijakan Publik, Vol 8*.